

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI ANGGARAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BANGGAI UTARA, KABUPATEN BANGGAI LAUT

Lasmy Tulutan¹, Gaffar², Nilawaty Yusuf³

¹Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; lasmytulutan@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; gaffar@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; nilawaty.yusuf@ung.ac.id

Corresponden E-Mail; lasmytulutan@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: (Diisi Editor) Diterima 18 Juli 2026 Direvisi; 20 Agustus 2026 Disetujui; 25 September 2026 Tersedia Daring; 21 Oktober 2026 Kata Kunci: <i>Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran Desa, Akuntabilitas Keuangan Desa, Banggai Utara</i>	Pengelolaan keuangan desa memerlukan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi agar terhindar dari ketidaktepatan sasaran pengalokasian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Pendekatan kuantitatif kausal eksplanatori menggunakan sampel 87 responden dari populasi 674 orang di enam desa melalui <i>proportionate stratified random sampling</i> (rumus Slovin, <i>error</i> 10%). Data dikumpulkan via kuesioner skala Likert 1–5: partisipasi masyarakat (5 indikator, 14 butir), transparansi anggaran desa (4 indikator, 12 butir), dan akuntabilitas keuangan desa (5 indikator, 12 butir). Analisis data menggunakan regresi linear berganda SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan nilai t hitung 2,746 dan nilai signifikansi 0,007. Transparansi anggaran desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan nilai t hitung 12,305 dan nilai signifikansi 0,000. Secara simultan, partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan nilai F hitung 94,519 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R ² sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi akuntabilitas keuangan desa dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa, sedangkan sisanya 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi anggaran desa memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,754 berbanding 0,161.

ABSTRACT
Keywords: <i>Community Participation, Village Budget Transparency, Village Financial Accountability, North Banggai</i>
<i>Village financial management requires community involvement and information disclosure to prevent inaccurate fund allocations. This study aims to examine the effect of community participation and village budget transparency on village financial accountability in North Banggai Subdistrict, Banggai Laut Regency. An explanatory causal quantitative approach used 87 respondents from a population of 674 across six villages via proportionate stratified random sampling (Slovin formula, 10% error). Data were collected using 1–5 Likert scale questionnaires: community participation (5 indicators, 14 items), village budget transparency (4 indicators, 12 items), and village financial accountability (5 indicators, 12 items). Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 25. The results showed that community participation had an effect on village financial accountability, with a t-count value of 2.746 and a significance level of 0.007. Village budget transparency had an effect on village financial accountability, with a t-count value of 12.305 and a significance level of 0.000. Simultaneously, community participation and village</i>

budget transparency affected village financial accountability, yielding an F-count value of 94.519 and a significance level of 0.000. The Adjusted R² value of 0.685 indicates that 68.5% of the variation in village financial accountability is explained by community participation and village budget transparency, while the remaining 31.5% is influenced by other factors outside the research model. This study concludes that village budget transparency has a greater influence than community participation on village financial accountability, as indicated by a regression coefficient value of 0.754 compared to 0.161.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di tingkat tapak. Landasan hukum pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dipertegas secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, siklus pengelolaan keuangan desa mencakup lima tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tata kelola anggaran yang begitu komprehensif ini menuntut pencatatan dan pertanggungjawaban yang sistematis demi memastikan seluruh alokasi dana dipergunakan sesuai target pembangunan desa.

Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik. Dalam ranah akuntansi sektor publik, fungsi akuntansi bukan sekadar instrumen pencatatan transaksi kas, melainkan mekanisme penyediaan informasi keuangan yang sah untuk mengukur ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran akuntabilitas keuangan desa menjadi krusial untuk dikaji karena besarnya alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa setiap tahunnya berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan serta pertanggungjawaban yang memadai.

Pencapaian akuntabilitas keuangan desa sangat ditentukan oleh peran aktif partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip transparansi anggaran. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan warga secara langsung maupun melalui perwakilan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan di musyawarah desa, pelaksanaan program, pengawasan independen, hingga evaluasi hasil kegiatan. Sementara itu, transparansi anggaran desa merupakan keterbukaan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang wajib dipublikasikan secara luas kepada publik agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara

pelibatan warga dan keterbukaan informasi ini diyakini mampu memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja keuangan aparat desa.

Fenomena pengelolaan alokasi dana di Kecamatan Banggai Utara menunjukkan bahwa setiap desa mengelola anggaran yang terbilang besar, yakni melebihi Rp1 miliar per tahun. Gambaran ringkas besaran anggaran dan realisasi pada enam desa di Kecamatan Banggai Utara untuk kurun waktu 2023 hingga 2025 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa di Kecamatan Banggai Utara Tahun 2023-2025.

Desa	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Bonebaru	2023	1.442.130.328	1.401.092.359
	2024	1.741.835.286	1.625.103.454
	2025	1.511.861.496	1.437.998.188
Tolisetubono	2023	1.431.682.718	1.431.682.718
	2024	1.412.619.000	1.412.619.000
	2025	1.390.688.706	1.390.688.706
Paisumosoni	2023	1.333.904.403	1.266.126.117
	2024	1.702.623.055	1.699.338.726
	2025	1.524.315.000	1.520.807.000
Popisi	2023	1.696.459.533	1.681.122.433
	2024	1.541.031.100	1.433.187.541
	2025	1.389.273.300	1.367.043.600
Lokotoy	2023	2.106.083.365	1.986.971.070
	2024	1.793.795.448	1.637.683.153
	2025	1.931.099.321	1.596.752.378
Kendek	2023	1.873.320.188	1.810.669.345
	2024	1.932.255.591	1.796.973.635
	2025	1.820.287.578	1.807.213.678

Sumber: Data Primer Diolah dari Dokumen Desa (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pada hampir seluruh desa di Kecamatan Banggai Utara. Variasi penyerapan anggaran yang fluktuatif di berbagai desa memperlihatkan adanya tantangan dalam tata kelola keuangan lokal. Sebagai contoh, di Desa Lokotoy pada tahun 2025, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.931.099.321 terealisasi sebesar Rp1.596.752.378, dengan tingkat capaian sebesar 82,69% atau selisih Rp334.346.943. Kondisi serupa tampak pada Desa Bonebaru tahun 2024 dengan anggaran Rp1.741.835.286 dan realisasi Rp1.625.103.454 (persentase realisasi 93,29%). Selisih angka tersebut tidak otomatis mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyelewengan dana, melainkan mencerminkan kompleksitas penyerapan anggaran yang menuntut kejelasan pertanggungjawaban kepada publik.

Kendala pengelolaan keuangan di wilayah kepulauan ini diperkuat oleh temuan Ronaldo et al. (2024) bahwa keterbatasan infrastruktur komunikasi sering kali menghambat penyebaran informasi anggaran. Selain itu, Amin dan Nasution (2025) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat kerap terkendala oleh minimnya forum diskusi yang memadai. Kondisi ini selaras dengan temuan lapangan di mana keterlibatan

warga pada tahap pengawasan mandiri masih memerlukan penguatan agar fungsi kontrol sosial berjalan optimal. Keterbatasan akses informasi dan ruang partisipasi tersebut menegaskan urgensi penerapan transparansi anggaran secara konsisten guna menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sebagai contoh, Desa Bonebaru pada tahun 2024 mencatatkan anggaran sebesar Rp1.741.835.286 dengan realisasi sebesar Rp1.625.103.454. Contoh lain terjadi di Desa Lokotoy pada tahun 2025, dengan penetapan anggaran sebesar Rp1.931.099.321 dan realisasi sebesar Rp1.596.752.378. Selisih angka ini tidak otomatis mengindikasikan adanya pelanggaran atau penyelewengan dana, namun fakta tersebut menegaskan perlunya kejelasan pertanggungjawaban dan transparansi laporan pelaksana kegiatan kepada seluruh warga desa.

Sejumlah penelitian terdahulu menguji hubungan antara partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan dengan temuan yang beragam. Penelitian Putri dan Mryono (2022) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan senada disampaikan oleh Hikmah et al. (2020) serta Kartika dan Fitria (2020) yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam menjamin akuntabilitas. Di sisi lain, Irmawati et al. (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa apabila tidak didukung oleh keterbukaan informasi. Mengenai variabel transparansi, Subandra et al. (2022) mengonfirmasi bahwa transparansi anggaran berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Adanya perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya pengujian kembali pada konteks wilayah lain.

Kondisi geografis Kabupaten Banggai Laut dan Kecamatan Banggai Utara yang bercorak wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam aksesibilitas informasi serta pengawasan publik. Temuan Ronaldo et al. (2024) mengindikasikan bahwa keterbatasan infrastruktur komunikasi di wilayah kepulauan sering kali menghambat penyebaran informasi anggaran. Selain itu, Amin dan Nasution (2025) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat di daerah terpencil kerap terkendala oleh minimnya forum diskusi yang memadai. Celah penelitian ini terletak pada masih terbatasnya studi akuntabilitas keuangan desa pada wilayah kepulauan spesifik di Banggai Utara, serta belum seragamnya hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh partisipasi dan transparansi.

Penelitian ini memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan dengan sejumlah studi terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Mryono (2022), Irmawati et al. (2020), Hikmah et al. (2020), Kartika dan Fitria (2020), serta Subandra et al. (2022). Dari sisi konteks wilayah, penelitian ini berfokus secara spesifik pada enam desa dalam satu wilayah kecamatan bercorak kepulauan dengan menganalisis cakupan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 hingga 2025. Dari aspek subjek penelitian, pengumpulan data melibatkan lima unsur responden yang komprehensif meliputi aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, unsur tokoh perempuan, dan unsur tokoh pemuda sehingga mampu merefleksikan perspektif multi-pihak secara lebih luas. Kontribusi empiris penelitian ini terletak pada pemetaan bobot

relatif pengaruh transparansi anggaran desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa di wilayah kepulauan, guna memperkaya khazanah literatur akuntansi sektor publik di tengah variasi temuan studi-studi sebelumnya.

Pengelolaan keuangan desa dalam kerangka administrasi publik kontemporer menuntut penerapan prinsip-prinsip good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan kerangka konseptual United Nations Development Programme (UNDP, 1997), tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat, bersifat transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara optimal kepada publik. Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas keuangan merupakan pilar utama yang saling beririsan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas.

Penguatan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini ditopang oleh teori partisipasi publik yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) serta teori keagenan (*agency theory*) dari Jensen dan Meckling (1976). Teori partisipasi publik menjelaskan bahwa keterlibatan warga secara aktif mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan merupakan wujud hakikat kedaulatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan lokal. Sementara itu, teori keagenan memandang hubungan antara pemerintah desa sebagai pihak pengelola (*agent*) dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (*principal*). Dalam hubungan keagenan tersebut, sering kali timbul asimetri informasi akibat ketimpangan akses data keuangan antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, penerapan transparansi anggaran desa menjadi instrumen strategis untuk mengurangi asimetri informasi, menyelaraskan kepentingan, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan tercapai secara efektif.

Penelitian ini memperkuat analisisnya dengan melandaskan pada Teori Stakeholder dan Teori Stewardship yang bersinergi dengan prinsip good governance, teori partisipasi publik, serta teori keagenan. Menurut Teori Stakeholder (Suryani, 2022), organisasi pemerintah desa tidak berdiri sendiri, melainkan harus memberikan manfaat dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat desa sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Teori Stewardship (Donaldson & Davis, 1991) memandang bahwa pemerintah desa berindak sebagai steward atau pengelola yang tepercaya, yang berorganisasi secara jujur demi kepentingan umum dan bukan demi kepentingan pribadi. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa sebagai instrumen pendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan perspektif teoretis tersebut, partisipasi masyarakat yang tinggi (X1) akan memperkuat kontrol sosial sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan desa (Y). Demikian pula, transparansi anggaran desa (X2) yang memadai akan memperkecil peluang penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga berdampak langsung pada penguatan akuntabilitas keuangan desa (Y). Secara bersama-sama, sinergi antara partisipasi masyarakat (X1) dan transparansi anggaran desa (X2)

membentuk ekosistem tata kelola pemerintahan yang solid dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa (Y) yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan uraian teoritis tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) H1: Partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.
- b) H2: Transparansi anggaran desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.
- c) H3: Partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial, transparansi anggaran desa secara parsial, serta pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya penerapan Teori Stakeholder dan Teori Stewardship dalam konteks tata kelola dana desa di wilayah kepulauan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan keterbukaan anggaran dan pelibatan warga, serta membantu masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial secara efektif.

2. Metode

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Bagian Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal eksplanatori guna menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen secara sistematis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian terwujud dalam bentuk angka numerik yang diukur menggunakan instrumen baku dan dianalisis melalui kaidah statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Desain kausal eksplanatori digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh variabel partisipasi masyarakat (X_1) dan transparansi anggaran desa (X_2) mampu mempengaruhi variabel akuntabilitas keuangan desa (Y). Melalui penerapan desain ini, karakteristik hubungan fungsional antarvariabel dapat diidentifikasi secara objektif berdasarkan temuan empiris di lokasi penelitian, sehingga keabsahan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Penentuan lokasi ditetapkan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa wilayah kecamatan tersebut mengelola alokasi dana desa dalam jumlah besar setiap tahunnya, serta memiliki karakteristik sosial dan geografis kepulauan yang khas terkait dinamika partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi anggaran. Rangkaian pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan secara resmi dimulai pada tanggal 13 Mei 2026, mencakup

seluruh tahapan perizinan administratif, pengujian instrumen, penyebaran kuesioner, hingga rekapitulasi data akhir dari responden.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini melibatkan keseluruhan elemen pemangku kepentingan yang berjumlah 674 orang yang tersebar di enam desa, yang terdiri dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, unsur tokoh perempuan melalui PKK, serta unsur tokoh pemuda melalui Karang Taruna. Ukuran sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$ dengan menetapkan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, sehingga menghasilkan angka 87,08 yang kemudian dibulatkan menjadi 87 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *proportionate stratified random* sampling dengan formula alokasi proporsional $n_i = \frac{N_i}{N} \times n$, untuk menjamin keterwakilan yang adil dari setiap kelompok strata responden di masing-masing desa. Rincian sebaran populasi dan sampel pada keenam desa disajikan secara terstruktur dalam Tabel 2 berikut.

Penentuan tingkat kesalahan (*error rate*) sebesar 10% dalam rumus Slovin dipilih dengan pertimbangan keterbatasan jangkauan geografis wilayah kepulauan serta untuk memastikan jumlah sampel tetap representatif dan dapat dijangkau secara efektif dalam proses pengumpulan data. Pemilihan sampel pada setiap desa dan setiap unsur strata dilakukan menggunakan teknik *proportionate stratified random* sampling agar keterwakilan elemen populasi terpenuhi secara proporsional. Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi: (1) aparat pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, (2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) tokoh agama, (4) unsur tokoh perempuan melalui PKK, serta (5) unsur tokoh pemuda melalui Karang Taruna yang memahami dinamika pembangunan dan keuangan desa.

Tabel 2. Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian per Desa.

No	Nama Desa	Populasi (Orang)	Sampel (Responden)
1	Bonebaru	81	10
2	Tolisetubono	85	11
3	Paisumosoni	79	10
4	Popisi	149	19
5	Lokotoy	153	20
6	Kendek	127	17
Jumlah	Total Keseluruhan	674	87

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Tabel 3. Rincian Populasi Responden per Unsur di Setiap Desa.

No	Nama Desa	Aparat Desa	BPD	Tokoh Agama	Tokoh Perempuan (PKK)	Tokoh Pemuda (Karang Taruna)	Total Populasi
1	Bonebaru	12	5	15	24	25	81
2	Tolisetubono	11	5	16	26	27	85
3	Paisumosoni	10	5	14	25	25	79
4	Popisi	14	7	26	51	51	149
5	Lokotoy	15	7	28	52	51	153

6	Kendek	13	7	23	42	42	127
Ju	Total	75	36	122	220	221	674
ml	Keseluruhan						
ah							

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

2.4 Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian diukur menggunakan instrumen kuesioner berstandar skala Likert dari rentang 1 sampai 5, yang mencakup kategori pilihan jawaban dari Tidak Pernah hingga Sangat Sering. Definisi operasional variabel, indikator utama, jumlah item pernyataan, serta skala pengukurannya dirangkum secara ringkas ke dalam Tabel 3. Mengingat tanggapan yang dikumpulkan melalui skala Likert menghasilkan data berskala ordinal, maka sebelum pengujian regresi linear berganda dilakukan, data tersebut wajib ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam skala interval menggunakan metode *Method of Successive Interval* (MSI).

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.

Variabel	Indikator Utama	Jumlah Item	Skala Pengukuran
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	Keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi	14 butir	Likert (1–5)
Transparansi Anggaran Desa (X ₂)	Keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban	12 butir	Likert (1–5)
Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	Kejujuran, transparansi, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas kebijakan	12 butir	Likert (1–5)

Sumber: Data Diolah (2026)

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran instrumen kuesioner kepada seluruh responden yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian di wilayah studi. Pengumpulan data memadukan dua pendekatan operasional, yaitu penggunaan e-kuesioner berbasis Google Form yang disalurkan melalui aplikasi pesan instan untuk memudahkan responden yang terbiasa menggunakan perangkat digital, serta pendistribusian kuesioner cetak secara langsung bagi responden yang memiliki keterbatasan akses jaringan internet di wilayah kepulauan. Kombinasi kedua teknik pengumpulan data ini diterapkan guna menjamin efektivitas penarikan data, pemerataan jangkauan responden, serta meminimalisir potensi kendala teknis di lapangan.

Prosedur pengumpulan data diawali dengan pengurusan izin penelitian kepada pihak pemerintah kecamatan dan desa setempat guna memperoleh legalitas formal. Selanjutnya, instrumen kuesioner diuji terlebih dahulu untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner kemudian disebarakan kepada 87 responden yang telah ditetapkan melalui perpaduan e-kuesioner berbasis Google Form dan kuesioner cetak

secara langsung. Proses pengumpulan data di lapangan berlangsung selama kurun waktu kurang lebih satu bulan. Berdasarkan total kuesioner yang didistribusikan, seluruh 87 kuesioner berhasil dikembalikan dengan lengkap dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

2.6 Teknik Analisis Data

Seluruh data empiris yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan program bantu statistik SPSS 25 dengan menetapkan taraf signifikansi sebesar 5%. Analisis statistik deskriptif diterapkan untuk menyajikan ringkasan karakteristik demografi serta distribusi jawaban responden terhadap masing-masing indikator penelitian. Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui teknik korelasi item-total, di mana butir pertanyaan dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,210. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan ambang batas minimal 0,70 guna memastikan tingkat konsistensi internal kuesioner. Rangkaian uji asumsi klasik juga dilakukan, meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas melalui nilai Tolerance dan VIF, serta uji heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi bebas dari penyimpangan asumsi ekonometrika. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan persamaan matematis $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Pengujian hipotesis akhir dijalankan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi untuk mengukur besaran proporsi keragaman variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh model regresi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Karakteristik Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan 87 responden yang tersebar di enam desa di Kecamatan Banggai Utara. Karakteristik responden diuraikan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, serta jabatan atau posisi responden dalam pemerintahan desa maupun kelembagaan masyarakat. Gambaran umum mengenai profil demografi dan latar belakang responden disajikan secara ringkas dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Responden Penelitian

Kategori Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	56	64,00
	Perempuan	31	36,00
Usia	21–30 tahun	29	33,33
	31–40 tahun	27	31,03
	41–50 tahun	22	25,29
	> 50 tahun	9	10,35
Pendidikan Terakhir	SMA	65	74,71
	Diploma	1	1,15
	Strata 1 (S1)	21	24,14
Total		87	100,00

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan data profil responden pada Tabel 4, komposisi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 56 orang atau 64%, sedangkan perempuan berjumlah 31 orang atau 36%. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif antara 21

hingga 40 tahun, yang mencerminkan keterlibatan aktif aparaturnya dan tokoh masyarakat usia produktif dalam pengelolaan keuangan desa. Dari segi tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden tamatan Sekolah Menengah Atas sebanyak 65 orang, disusul jenjang Strata 1 sebanyak 21 orang, dan Diploma sebanyak 1 orang. Sebaran ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang memadai dalam menjawab instrumen penelitian secara objektif.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menyajikan gambaran penyebaran skor jawaban responden untuk setiap variabel penelitian yang diukur menggunakan skala Likert. Nilai rata-rata skor tanggapan untuk variabel partisipasi masyarakat menunjukkan rentang perolehan skor item berkisar antara 3,80 sampai 4,69. Skor rata-rata tertinggi pada variabel partisipasi masyarakat tercatat pada item pertama dengan nilai 4,69, sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada item keenam dengan nilai 3,80. Variabel akuntabilitas keuangan desa mencatatkan kisaran rata-rata item antara 4,16 sampai 4,69, dengan skor tertinggi pada item pertama sebesar 4,69 dan skor terendah pada item kesembilan sebesar 4,16. Sementara itu, variabel transparansi anggaran desa menunjukkan persepsi penilaian responden yang tinggi terhadap keterbukaan informasi anggaran di tingkat desa. Ringkasan rata-rata skor per variabel penelitian disajikan secara terstruktur dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Jumlah Item	Skor Minimum	Skor Maksimum	Rata-rata Variabel
Partisipasi Masyarakat (X_1)	14	3,80	4,69	4,25
Transparansi Anggaran Desa (X_2)	12			4,32
Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	12	4,16	4,69	4,41

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas instrumen dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel partisipasi masyarakat, transparansi anggaran desa, dan akuntabilitas keuangan desa dinyatakan valid karena nilai r hitung berada di atas batas kritis r tabel sebesar 0,210. Koefisien korelasi item valid untuk variabel partisipasi masyarakat berkisar antara 0,503 sampai 0,762, variabel transparansi anggaran desa berkisar dari 0,565 sampai 0,869, dan variabel akuntabilitas keuangan desa memiliki nilai terendah sebesar 0,403 pada butir kedua. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan angka di atas ambang batas minimum 0,70, yang menandakan bahwa instrumen kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Rangkuman hasil uji reliabilitas instrumen penelitian tercantum dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Batas Minimum	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X_1)	14	0,871	0,70	Reliabel
Transparansi Anggaran Desa (X_2)	12	0,911	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	12	0,869	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna memastikan bahwa model regresi linear berganda terbebas dari penyimpangan statistik sebelum pengujian hipotesis dijalankan. Uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200, yang berada di atas taraf signifikansi 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,929 dan nilai *VIF* sebesar 1,076 untuk kedua variabel independen, yang berarti model regresi bebas dari masalah multikolinearitas karena nilai Tolerance di atas 0,10 dan *VIF* di bawah 10,0. Pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi korelasi untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,592 dan transparansi anggaran desa sebesar 0,606. Kedua nilai signifikansi tersebut berada di atas 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa terhadap akuntabilitas keuangan desa. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari pengolahan data adalah $Y = 2,739 + 0,161 X_1 + 0,754 X_2$. Nilai konstanta sebesar 2,739 dengan Standard Error 3,018, nilai *t* hitung 0,908, dan tingkat signifikansi 0,367. Rincian hasil koefisien regresi masing-masing variabel independen disajikan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien Regresi (β)	Standard Error	t hitung	Signifikansi
(Konstanta)	2,739	3,018	0,908	0,367
Partisipasi Masyarakat (X_1)	0,161	0,059	2,746	0,007
Transparansi Anggaran Desa (X_2)	0,754	0,061	12,305	0,000

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Pengujian parsial melalui uji *t* menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai *t* hitung sebesar 2,746 dengan tingkat signifikansi 0,007. Nilai *t* hitung tersebut lebih besar dari *t* tabel sebesar 1,989 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa. Variabel transparansi anggaran desa mencatatkan nilai *t* hitung sebesar 12,305 dengan tingkat signifikansi 0,000. Angka *t* hitung tersebut jauh melampaui *t* tabel 1,989 dengan

signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima, yang menyatakan bahwa transparansi anggaran desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Pengujian simultan melalui uji F dilakukan untuk menguji pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Rangkuman hasil uji F disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F).

Model ANOVA	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Signifikansi
Regression	3072,153	2	1536,076	94,519	0,000
Residual	1365,125	84	16,251		
Total	4437,278	86			

F tabel = 3,105 / Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 8, nilai F hitung tercatat sebesar 94,519 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai F hitung tersebut jauh lebih besar daripada F tabel sebesar 3,105 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Temuan ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara.

Besaran kontribusi pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel terikat diukur melalui koefisien determinasi. Ringkasan model regresi dan koefisien determinasi disajikan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Ringkasan Model dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,832	0,692	0,685	4,031

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 9, nilai korelasi (R) sebesar 0,832 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas dan terikat. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi perubahan akuntabilitas keuangan desa dapat dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa. Sementara itu, sisa sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

3.2 Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara. Nilai t hitung variabel partisipasi masyarakat tercatat sebesar 2,746 dengan tingkat signifikansi 0,007, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,161 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas partisipasi akan mendorong peningkatan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa keterlibatan warga dalam setiap tahapan pengelolaan dana memberikan dorongan moral bagi aparat desa untuk bekerja secara tertib aturan. Skor rata-rata item partisipasi yang berada pada kategori tinggi menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah penelitian memiliki kesadaran untuk hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Meskipun demikian, keterlibatan

pada tahap pengawasan mandiri masih memerlukan penguatan agar fungsi kontrol sosial berjalan optimal.

Temuan ini sejalan dengan Teori Stakeholder yang menekankan bahwa organisasi sektor publik harus mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama berhak mengetahui dan mengawasi alokasi dana agar pemanfaatannya tepat sasaran. Hubungan timbal balik antara warga dan pemerintah desa memperkuat legitimasi pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Putri dan Mryono (2022) serta Hikmah et al. (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Irmawati et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa partisipasi tidak selalu berdampak signifikan apabila tidak didukung oleh keterbukaan informasi yang memadai di tingkat lokal. Perbedaan hasil ini dari temuan Irmawati et al. (2020) kemungkinan besar disebabkan oleh konteks karakteristik wilayah penelitian di Kecamatan Banggai Utara, di mana kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadiri musyawarah pembangunan desa mampu mengimbangi keterbatasan akses informasi lokal sehingga partisipasi tetap berdampak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Implikasi praktis dari temuan ini mengharuskan pemerintah desa di Kecamatan Banggai Utara untuk membuka ruang dialog yang lebih luas bagi warga. Peningkatan kualitas musyawarah desa perlu terus didorong agar partisipasi masyarakat tidak bersifat formalitas belaka, melainkan substantif dalam mengawal anggaran.

Pengaruh Transparansi Anggaran Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Pengujian hipotesis membuktikan bahwa transparansi anggaran desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa. Nilai t hitung variabel transparansi anggaran desa mencapai 12,305 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang jauh berada di bawah batas 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,754 menunjukkan bahwa transparansi anggaran memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap perwujudan akuntabilitas.

Besarnya pengaruh transparansi anggaran dalam konteks wilayah kepulauan di Kecamatan Banggai Utara dapat dijelaskan melalui karakteristik keterbatasan aksesibilitas informasi yang dihadapi masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui publikasi fisik, baliho, maupun papan informasi desa menjadi rujukan utama bagi warga untuk mengetahui alokasi dana secara pasti tanpa harus bergantung sepenuhnya pada forum musyawarah. Di sisi lain, meskipun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tergolong tinggi, keterlibatan pada tahap pengawasan mandiri masih memerlukan penguatan. Ketika dokumen dan realisasi anggaran disajikan secara transparan di ruang publik desa, masyarakat memiliki landasan informasi yang kuat untuk melakukan fungsi pengawasan sosial secara efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian informasi anggaran memegang peranan yang lebih determinan dalam memandu kontrol publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa dapat ditekan secara optimal.

Temuan ini didukung oleh Teori Stewardship yang memandang pengelola anggaran sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik. Pemerintah desa sebagai pengelola bertindak transparan guna memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi mandat. Transparansi menjadi instrumen utama dalam menjaga hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Subandra et al. (2022) yang menegaskan bahwa transparansi anggaran merupakan faktor penentu utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Keterbukaan informasi keuangan terbukti menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di tingkat desa.

Secara empiris, perbedaan kekuatan pengaruh antara kedua variabel independen tersebut terlihat jelas dari besaran nilai koefisien regresi dan uji statistik. Transparansi anggaran desa menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,754 dengan nilai *t* hitung mencapai 12,305, yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,161 dan *t* hitung 2,746. Berdasarkan perspektif teori keagenan, transparansi anggaran berfungsi langsung sebagai instrumen strategis untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks wilayah penelitian, ketika informasi keuangan disebarluaskan secara terbuka, masyarakat merasa memiliki kepastian data untuk menilai kinerja pengelolaan dana tanpa terkendala oleh terbatasnya ruang dialog partisipatif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Irmawati et al. (2020) bahwa partisipasi warga belum tentu berdampak optimal terhadap akuntabilitas apabila tidak didukung secara memadai oleh keterbukaan informasi lokal. Oleh karena itu, transparansi anggaran menjadi faktor penggerak yang lebih dominan dalam menjamin kepatuhan dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

Implikasi praktis bagi pemerintah desa adalah perlunya konsistensi dalam memasang baliho transparansi anggaran di tempat publik yang mudah diakses warga. Aparat desa perlu memastikan bahwa seluruh dokumen laporan realisasi anggaran disebarluaskan secara transparan tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Anggaran Desa secara Simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil analisis regresi berganda secara simultan menunjukkan nilai *F* hitung sebesar 94,519 dengan tingkat signifikansi 0,000. Angka tersebut membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara. Kedua variabel ini terbukti menjadi prediktor yang kuat dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal.

Nilai Adjusted *R* Square sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi akuntabilitas keuangan desa dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa. Sisa sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar aspek akuntabilitas keuangan telah dapat dijelaskan secara memadai oleh model penelitian yang diuji.

Pengaruh simultan ini memperkuat pandangan Teori Stakeholder dan Teori Stewardship secara bersamaan dalam tata kelola keuangan desa. Keterlibatan pemangku kepentingan melalui partisipasi aktif harus berjalan beriringan dengan komitmen pengelola anggaran untuk menyajikan informasi secara transparan. Sinergi kedua elemen ini menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif. Hasil statistik yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,746 dengan tingkat signifikansi 0,007 dan koefisien regresi 0,161 memperkuat perspektif teori partisipasi publik dan prinsip *good governance*, di mana keterlibatan warga secara aktif dalam pengelolaan dana desa terbukti mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel.

Temuan ini sejalan dengan kajian empiris dari Kartika dan Fitria (2020), Putri dan Mryono (2022), Hikmah et al. (2020), serta Subandra et al. (2022) yang menegaskan bahwa kualitas akuntansi sektor publik menuntut kombinasi antara pelibatan warga dan keterbukaan informasi pemerintah. Besaran nilai Adjusted R^2 sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi akuntabilitas keuangan desa dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran, sementara sisa 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sebagaimana diindikasikan dalam studi Devi et al. (2024), faktor-faktor lain tersebut mencakup aspek tambahan seperti tingkat kompetensi aparatur desa dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan.

Implikasi praktis dari temuan ini menyarankan agar pemerintah desa membangun sistem tata kelola yang memadukan pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi secara berkesinambungan. Upaya peningkatan akuntabilitas keuangan tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan salah satu unsur saja tanpa dukungan unsur lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama terkait tata kelola keuangan desa di Kecamatan Banggai Utara. Pertama, partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan nilai t hitung sebesar 2,746 dan tingkat signifikansi 0,007. Kedua, transparansi anggaran desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan nilai t hitung sebesar 12,305 dan signifikansi 0,000, serta menunjukkan pengaruh yang jauh lebih dominan dibandingkan partisipasi masyarakat. Ketiga, secara simultan, partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan nilai F hitung 94,519 dan signifikansi 0,000, di mana nilai Adjusted R^2 sebesar 68,5% menunjukkan bahwa variasi akuntabilitas keuangan desa mampu dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Implikasi praktis dari temuan ini menyarankan agar pemerintah desa meningkatkan efektivitas akses informasi anggaran, menyediakan forum partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen warga, serta menyusun mekanisme pelaporan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam interpretasi hasil maupun pengembangan studi lanjutan. Pertama, ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa, sehingga belum mencakup faktor penentu lain yang turut memengaruhi akuntabilitas keuangan. Kedua, cakupan wilayah penelitian terbatas pada satu kecamatan di wilayah kepulauan, yang membuat hasil temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk karakteristik wilayah lain yang berbeda. Ketiga, keterbatasan durasi waktu penelitian serta kondisi geografis wilayah kepulauan turut memengaruhi dinamika dan jangkauan pengambilan data di lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hendaknya dipahami dalam konteks ruang lingkup empiris yang telah ditentukan tersebut.

5. Saran

Temuan empiris dalam penelitian ini melahirkan beberapa rekomendasi praktis yang ditujukan langsung kepada pemerintah desa dan unsur masyarakat di lokasi penelitian. Pemerintah desa di Kecamatan Banggai Utara disarankan untuk menerjemahkan temuan penelitian ini ke dalam langkah-langkah perbaikan nyata secara berkelanjutan. Pertama, sejalan dengan temuan dominannya pengaruh transparansi anggaran, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat publikasi informasi melalui pemasangan baliho atau papan informasi anggaran di lokasi strategis yang mudah diakses publik, menyajikan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menggunakan bahasa yang sederhana, serta memanfaatkan ragam media informasi desa agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, menindaklanjuti temuan terkait partisipasi dan perlunya penguatan pada tahap pengawasan, pemerintah desa disarankan untuk menyelenggarakan musyawarah desa secara lebih inklusif dengan memastikan pelibatan aktif perwakilan perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat secara proporsional. Ketiga, pemerintah desa dapat menyusun dan mempublikasikan pelaporan realisasi anggaran secara berkala dengan format yang transparan dan ramah warga guna memastikan kontrol sosial berjalan secara efektif. Upaya terstruktur ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal tanpa mengabaikan faktor-faktor penentu lainnya.. Sementara itu, masyarakat desa diharapkan agar senantiasa menjaga dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Keterlibatan warga hendaknya dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan pengelolaan anggaran, hingga tahap evaluasi akhir demi memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Bagi pihak akademisi dan peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengembangkan kajian di bidang akuntansi sektor publik, terdapat beberapa saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan. Peneliti mendatang disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian tidak hanya terbatas pada satu kecamatan saja, melainkan mencakup skala kabupaten yang lebih luas agar hasil temuan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperkaya model empiris dengan menambahkan variabel-variabel baru yang diduga turut memengaruhi

akuntabilitas keuangan desa, seperti tingkat kompetensi aparatur desa, efektivitas sistem pengendalian internal, tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen organisasi. Penambahan ragam variabel tersebut diyakini mampu memperkaya khazanah literatur ilmiah sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penentu akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintahan desa.

6. Daftar Pustaka

Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Sudiana, & I Putu Deddy Samtika Putra. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, 254–280.

Aliana Karin Putri Haikal, & Siti Hazzah Nur. (2024). Transparansi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 122–130.

Andika Subandra, Usdeldi, & Eri Nufriza. (2022). Pengaruh transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. *Journal of Applied Accounting and Business*, 4(2), 41–48.

Andini Setyaningrum, Maya Widyana Dewi, & Indra Lila Kusuma. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Atshari Sri Devi, Afridian Wirahadi Ahmad, & Fera Sriyunianti. (2024). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business*, 6(2), 1–10.

Chrisma Angellicca Rivera, Siti Khoirina, & Dewi Silvia. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3723–3735.

Elisa Rama Yanti, Wiralestari, & Wiwik Tiswiyanti. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(1), 53–64.

Endar Ayu Yusnida, & Mirza Anindya Pangestika. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(1), 25–40.

Helmi Safitri. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 250–259.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Kartika Restu Aprilya, & Astri Fitria. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Leonita Suryani. (2022). Kinerja Bank Syariah : Pengungkapan ICSR Berdasarkan Teori Stakeholder dari Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 479–486.
- Muhamad Amin, & Adnan Nasution. (2025). Mewujudkan Tata Kelola yang Partisipatif: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banggai. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 5(1), 1–20.
- Novia Efendi, Ade Budi Setiawan, & Maria Magdalena Melani. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 4(1), 30–38.
- Ronaldo, M. Nur Alamsyah, & Moh. Tabran Hi. Ambotuo. (2024). Management of Village Fund Allocation in Timbong Village, Central Banggai Subdistrict, Banggai Laut Regency. *Journal of Public Administration and Government*, 6(1), 10–15.
- Siti Munawaroh, Djupiansyah Ganie, & Sayugo Adi Purwanto. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, 8(1), 60–69.
- United Nations Development Programme [UNDP]. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. United Nations Development Programme.